

BAB I

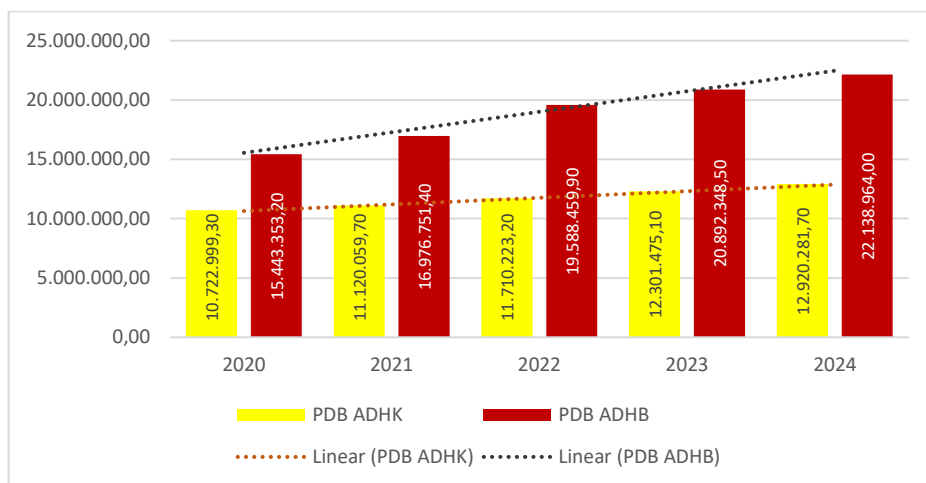
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses multidimensional yang tidak hanya mencakup akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional. Secara fundamental, tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mengukur skala pencapaian tujuan tersebut, indikator makroekonomi yang paling umum digunakan adalah produk domestik bruto. Dalam penyajiannya, PDB dibedakan menjadi dua, yaitu PDB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau PDB Nominal, yang mengukur nilai output berdasarkan harga pada tahun berjalan, dan PDB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau PDB Riil, yang mengukur nilai output berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu.

Munculnya selisih atau *gap* yang semakin melebar antara PDB Nominal dan PDB Riil menjadi sebuah isu krusial yang memerlukan perhatian. Fenomena ini secara esensial menandakan adanya tekanan inflasi dalam perekonomian, dimana pertumbuhan nilai output secara nominal lebih banyak didorong oleh kenaikan tingkat harga umum daripada peningkatan riil volume produksi barang dan jasa. Urgensi dari analisis fenomena ini terletak pada potensinya untuk menciptakan persepsi yang keliru mengenai kesehatan ekonomi suatu negara (Handoyo et al., 2022).

Dampak dari melebarnya selisih antara PDB Nominal dan PDB Riil dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, karena perbedaan tersebut mengindikasikan adanya tekanan inflasi yang dapat menurunkan daya beli dan kesejahteraan riil (Hidayat et al., 2022). Kelompok masyarakat berpenghasilan tetap dan rendah menjadi pihak yang paling rentan, karena kenaikan harga barang dan jasa tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang sepadan (Putri et al., 2023). Kondisi ini tidak hanya berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan secara agregat, tetapi juga dapat memicu ketidakpastian ekonomi bagi rumah tangga dan pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat menghambat konsumsi dan investasi. Maka dari itu, untuk mempertegas urgensi dari penelitian ini berikut disajikan data historis perkembangan PDB Indonesia selama 5 tahun terakhir pada grafik di bawah ini.



Sumber: BPS, 2026 (data diolah)

Gambar 1.1 Perbandingan PDB ADHB dan PDB ADHK (Miliar IDR)

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, data menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pada perekonomian Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terlihat mengalami lonjakan yang cukup tajam, bergerak dari angka sekitar 15.443 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 22.138

triliun rupiah pada tahun 2024. Sementara itu, PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami pertumbuhan positif, namun dengan laju yang lebih landai, yaitu dari 10.722 triliun rupiah menjadi 12.920 triliun rupiah dalam kurun waktu yang sama. Fenomena yang bisa tarik kesimpulannya dari grafik tersebut adalah semakin melebarnya jarak (*gap*) antara nilai PDB Nominal dan PDB Riil dari tahun ke tahun. Selisih yang kian membesar ini menunjukkan bahwa porsi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir lebih banyak disumbang oleh kenaikan harga-harga dibandingkan dengan penambahan volume produksi barang dan jasa. Kondisi ini tidak terlepas dari tantangan eksternal dan internal, seperti kenaikan harga komoditas energi dan pangan global, serta penyesuaian pasar pasca-pandemi yang berdampak langsung pada biaya hidup. Sebagaimana dijelaskan oleh Pratama & Wibowo (2023), ketidakstabilan harga yang tercermin dari kesenjangan ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi riil dan menurunkan kesejahteraan karena tergerusnya daya beli masyarakat.

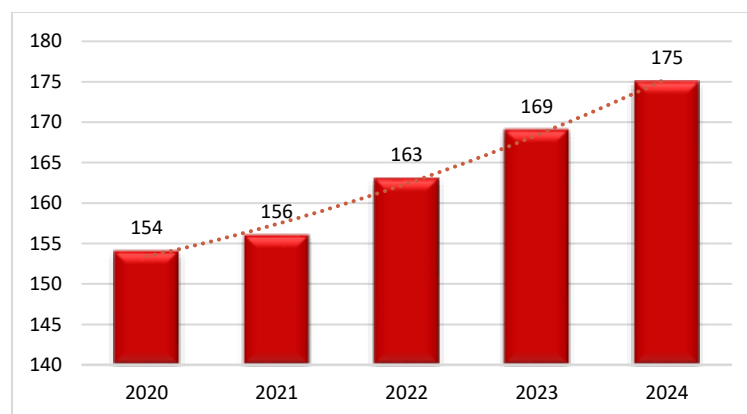
Kemudian jika ditinjau berdasarkan teori, fenomena inflasi yang mendasari kesenjangan antara PDB Nominal dan PDB Riil dapat dijelaskan melalui Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory of Money*) yang dipopulerkan oleh Irving Fisher. Secara konseptual, teori ini menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian dengan tingkat harga secara umum. Artinya, jika jumlah uang yang beredar meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan output barang dan jasa, maka tingkat harga akan cenderung naik, yang pada gilirannya menyebabkan inflasi (Mankiw, 2006, dalam Nugroho et al., 2023).

Dalam ekonomi makro, PDB Nominal memiliki fungsi untuk merepresentasikan struktur perekonomian dan pergeseran nilai sektor-sektor ekonomi berdasarkan harga pasar saat ini. Indikator ini digunakan dalam analisis yang berkaitan dengan variabel moneter dan keuangan, seperti permintaan uang, rasio pajak, dan transaksi perbankan, karena mencerminkan nilai uang yang beredar di masyarakat pada waktu tersebut (Wijaya & Arifin, 2021), sehingga pemangku kebijakan dapat melihat potensi ekonomi suatu wilayah dalam nilai aktualnya serta kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi dan investasi berdasarkan tingkat harga yang sedang berlaku.

Sementara PDB Riil didefinisikan sebagai nilai total barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. Menurut Rahardjo & Firdaus (2023), fungsi utama dari indikator ini adalah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara murni dengan meniadakan faktor perubahan harga (inflasi), sehingga angka yang dihasilkan mencerminkan peningkatan volume produksi fisik dalam perekonomian. Bagi pemerintah, PDB Riil digunakan sebagai instrumen utama untuk mengevaluasi keberhasilan kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu. Selain itu, indikator ini juga menjadi acuan dasar bagi pemangku kebijakan dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional serta merumuskan strategi untuk memacu produktivitas sektor-sektor unggulan (Wulandari & Santoso, 2021).

Meskipun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, kesenjangan yang terus melebar antara PDB Nominal dan PDB Riil secara inheren merepresentasikan akumulasi dari tekanan inflasi agregat dalam perekonomian. Selisih ini disebut

sebagai *GDP Deflator*, ditegaskan dalam studi Siregar & Sukmana (2022) sebagai indikator inflasi yang komprehensif karena mencakup perubahan harga seluruh barang dan jasa domestik. Namun, untuk menganalisis dampak inflasi secara langsung terhadap kesejahteraan rumah tangga, penggunaan Indeks Harga Konsumen (IHK) dinilai lebih relevan karena secara spesifik mengukur keranjang konsumsi masyarakat. Data historis menunjukkan bahwa IHK mengalami tren kenaikan persisten dalam lima tahun terakhir, yang mengimplikasikan terjadinya erosi daya beli riil secara berkelanjutan. Kenaikan level harga ini menandakan adanya isu struktural yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas makroekonomi (Putri & Purnomo, 2023). Untuk melihat dinamika perubahan harga di tingkat konsumen tersebut, berikut disajikan grafik perkembangan data IHK di Indonesia.



Sumber: World Bank, 2026 (data diolah)

Gambar 1.2 Indeks Harga Konsumen

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, dengan menggunakan tahun 2010 sebagai basis (nilai 100), mengindikasikan adanya tren inflasi yang berkelanjutan dalam perekonomian, dimana IHK terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 175 pada tahun 2024. Ketika IHK meningkat, misalnya dari 100 ke 175, ini berarti

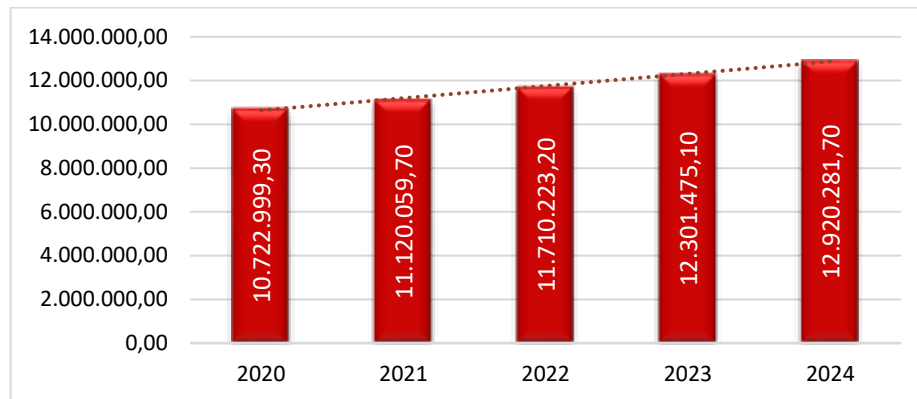
rata-rata harga barang dan jasa telah mengalami kenaikan kumulatif sebesar 73% dalam periode tersebut. Dalam rentang waktu ini, dinamika kenaikan harga terlihat sangat fluktuatif, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada periode 2013–2015 yang mencapai hampir 7% per tahun kemungkinan besar didorong oleh penyesuaian harga energi sebelum melambat drastis menjadi hanya 1.30% di tahun 2020–2021 akibat kontraksi permintaan selama pandemi, dan kemudian kembali melonjak di tahun 2021–2022 sebagai respons pemulihan permintaan dan gangguan rantai pasok global.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara langsung memengaruhi dan mendefinisikan laju inflasi, yang merupakan metrik krusial dalam perumusan kebijakan moneter. Kenaikan IHK, dalam data historis dari 2010 hingga 2024 (mencapai 175 di tahun terakhir), secara fundamental adalah representasi statistik dari laju inflasi rata-rata yang dialami oleh rumah tangga (Mandeya et al., 2021). Secara teknis, inflasi merupakan persentase perubahan tahunan dari IHK, mencerminkan seberapa cepat nilai uang terdepresiasi dalam konteks konsumsi sehari-hari. Peningkatan IHK yang persisten ini menandakan bahwa tekanan inflasi tersebut telah meresap ke dalam struktur harga barang dan jasa yang esensial bagi masyarakat.

Lonjakan harga pada barang kebutuhan pokok yang sangat vital dan mendominasi pengeluaran masyarakat dapat memicu guncangan (*shock*) dalam perekonomian. Seperti kenaikan pada harga kelompok energi (seperti bahan bakar dan listrik) serta bahan pangan strategis (seperti beras, gula, dan minyak goreng). Peningkatan harga energi akan memicu *cost-push inflation* karena energi adalah

input horizontal bagi hampir semua sektor produksi (Putri & Purnomo, 2023). Studi oleh Sari & Dzulkrirom (2022) juga menyoroti bahwa kenaikan harga pangan dan energi memiliki efek gelombang (*multiplier effect*) yang lebih cepat dan lebih besar dalam memengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat dan inflasi, dibandingkan dengan kenaikan harga pada barang tersier. Kenaikan pada harga-harga vital ini dapat mengurangi daya beli masyarakat, memicu keresahan sosial, hingga mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga (Siregar & Sukmana, 2022).

Tren yang meningkat pada indeks harga konsumen merupakan indikasi dari adanya ketidakseimbangan struktural yang diawali oleh pelebaran kesenjangan antara PDB Nominal dan PDB Riil yang telah diamati. Hal ini kemudian dapat dianalisis melalui faktor-faktor determinan yang diduga menjadi pendorongnya. Kenaikan level harga bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi kompleks berbagai kekuatan ekonomi. Untuk mengurai kompleksitas ini, peneliti memulai dari variabel makroekonomi paling fundamental yang merepresentasikan sisi permintaan agregat dalam perekonomian, yaitu output riil. Produk domestik bruto atas dasar harga konstan adalah total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara, yang diukur berdasarkan harga konstan. Berdasarkan laporan resmi dari BPS, PDB ADHK Indonesia secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.



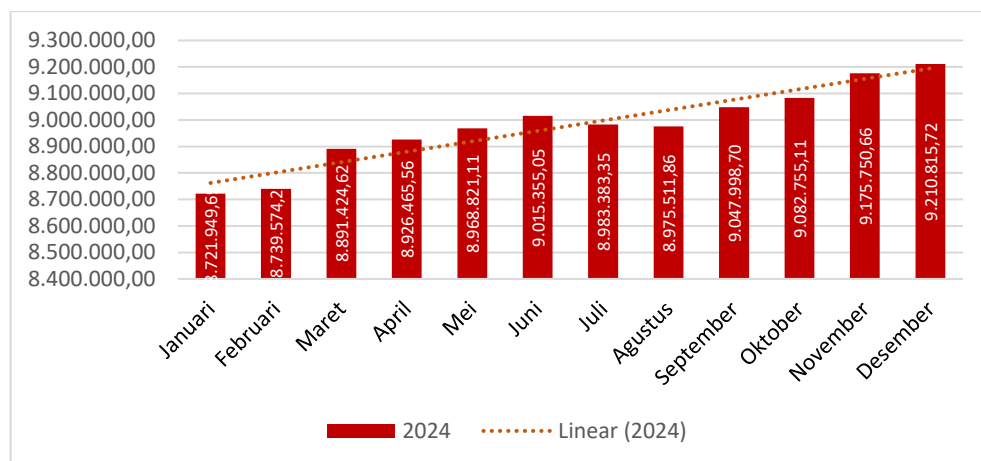
Sumber: BPS, 2026 (data diolah)

Gambar 1.3 Perkembangan PDB ADHK Tahun Dasar 2010 (Miliar IDR)

Menurut Mankiw (2006), produk domestik bruto memengaruhi IHK melalui mekanisme tarikan permintaan (*demand-pull*). Peningkatan output riil mencerminkan naiknya pendapatan nasional, yang kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong konsumsi. Apabila lonjakan permintaan agregat ini tidak dapat diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi (*supply*) secara proporsional, maka akan terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) yang mendorong kenaikan level harga umum. Tinjauan literatur oleh Wulandari & Sani (2022) mengonfirmasi hubungan ini menggunakan analisis kointegrasi, mereka menemukan bahwa dalam jangka panjang, guncangan pada output riil memiliki pengaruh positif terhadap kenaikan IHK, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan sisi permintaan agregat merupakan kunci untuk menjaga stabilitas harga.

Dalam perekonomian makro, jumlah uang beredar (JUB) merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan likuiditas di pasar, yang didefinisikan sebagai total uang yang berada di tangan masyarakat untuk berbagai tujuan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Secara umum, JUB terbagi atas uang beredar

dalam arti sempit (M1) yang meliputi uang kartal (uang kertas dan logam) dan uang giral (saldo rekening koran/cek), serta uang beredar dalam arti luas (M2) yang mencakup M1 ditambah dengan uang kuasi (deposito berjangka dan tabungan). Perubahan pada JUB sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kondisi permintaan kredit perbankan. Perkembangan JUB yang pesat dalam periode tertentu, misalnya setelah adanya stimulus ekonomi atau saat pemulihan dari krisis, sering kali menjadi perhatian utama karena berpotensi memengaruhi stabilitas harga. Untuk melihat bagaimana pergerakan JUB dalam perekonomian Indonesia, dapat dilihat pada grafik berikut:



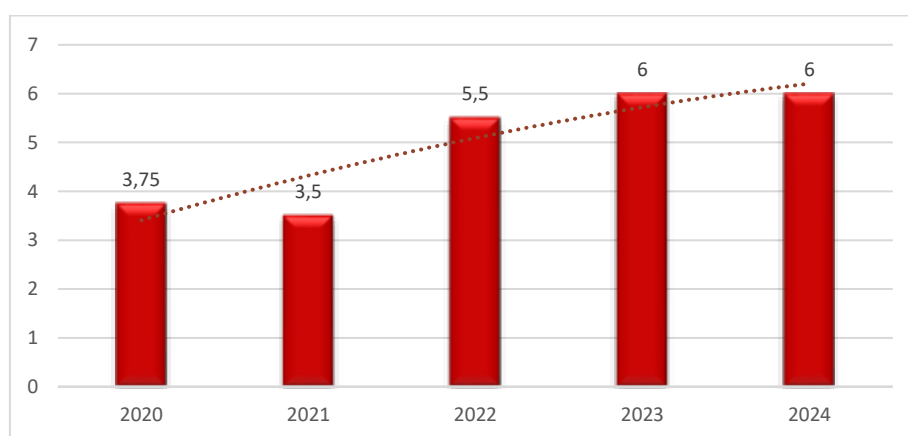
Sumber: Bank Indonesia, 2026 (data diolah)

Gambar 1.4 Jumlah Uang Beredar (M2) (Miliar IDR)

Dalam satu tahun terakhir, pergerakan jumlah uang beredar mengalami fluktuasi atau pertumbuhan tinggi dapat menjadi fenomena penting yang perlu diidentifikasi karena memiliki korelasi yang erat dengan tekanan IHK, yang merepresentasikan tingkat inflasi. Menurut Teori Kuantitas Uang klasik, peningkatan JUB yang tidak diimbangi dengan kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kelebihan permintaan agregat, yang pada gilirannya mendorong

kenaikan harga umum, tercermin dari meningkatnya IHK. Secara empiris, beberapa penelitian di Indonesia telah menguatkan adanya keterkaitan ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2023) menemukan bahwa secara parsial, JUB berpengaruh terhadap IHK di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan dalam JUB akan memperkuat daya beli masyarakat. Jika peningkatan ini melebihi kapasitas produksi nasional, maka akan tercipta kelebihan likuiditas yang mendesak harga-harga barang dan jasa di pasar naik, sehingga meningkatkan IHK. Dengan demikian, pengendalian jumlah uang beredar melalui instrumen kebijakan moneter menjadi esensial dalam upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan laju inflasi yang terukur oleh indeks harga konsumen.

Selanjutnya, dari sisi kebijakan moneter, instrumen utama yang digunakan untuk menjaga stabilitas harga adalah *BI Rate* atau suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Grafik perkembangan *BI Rate* menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, merefleksikan respons kebijakan moneter terhadap kondisi ekonomi. Rincian pergerakan *BI Rate* selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

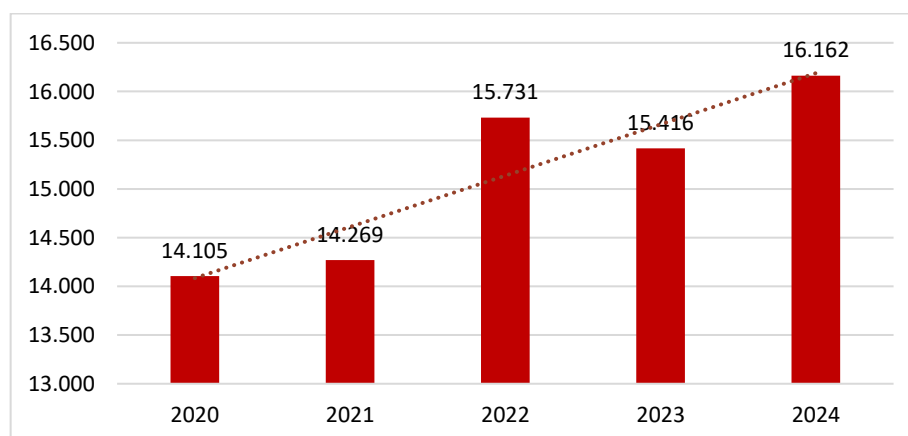


Sumber: Bank Indonesia, 2026 (data diolah)

Gambar 1.5 Perkembangan Suku Bunga Acuan (Persen)

Perubahan *BI Rate* dapat memengaruhi indeks harga konsumen melalui berbagai jalur transmisi kebijakan moneter. Kenaikan *BI Rate*, misalnya, akan ditransmisikan pada kenaikan suku bunga kredit perbankan, yang membuat biaya modal untuk investasi dan kredit konsumsi menjadi lebih mahal. Hal ini diharapkan dapat mendinginkan permintaan agregat dan meredam tekanan pada IHK. Studi empiris oleh Azis & Hartomo (2023), menganalisis efektivitas jalur suku bunga ini di Indonesia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perubahan *BI Rate* memiliki efek yang signifikan terhadap pembentukan IHK, meskipun terdapat jeda waktu (*time lag*) antara implementasi kebijakan hingga dampaknya terasa secara penuh di tingkat harga konsumen.

Dalam ekonomi makro, peran nilai tukar merupakan salah satu faktor eksternal penting yang dapat memengaruhi harga domestik. Nilai tukar didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Grafik nilai tukar Rupiah menunjukkan volatilitas yang tinggi, dipengaruhi oleh sentimen pasar global dan fundamental ekonomi domestik. Untuk analisis lebih lanjut, data historis nilai tukar disajikan pada grafik berikut ini.



Sumber: Bank Indonesia, 2026 (data diolah)

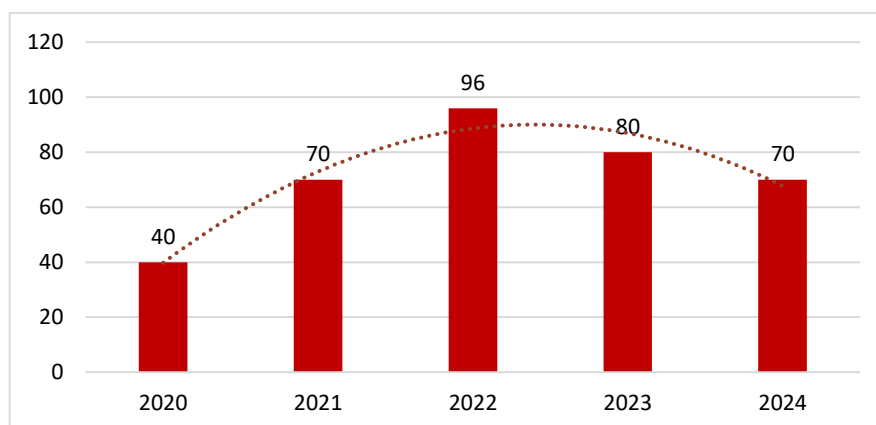
Gambar 1.6 Nilai Tukar (IDR terhadap USD)

Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap USD mengalami tren yang meningkat sebesar 0,12% pada lima tahun terakhir. Dampak nilai tukar terhadap indeks harga konsumen terjadi melalui fenomena yang disebut dengan *exchange rate pass-through*. Depresiasi rupiah secara langsung akan meningkatkan harga barang-barang impor, baik barang jadi maupun bahan baku untuk industri. Kenaikan harga bahan baku ini akan meningkatkan biaya produksi perusahaan domestik, yang kemudian akan dibebankan kepada konsumen melalui harga jual produk yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh R. A. Pratama (2022), secara spesifik meneliti tingkat *pass-through* nilai tukar terhadap IHK di Indonesia. Studinya menemukan bahwa efek rambatan ini bersifat asimetris, dimana dampak depresiasi terhadap kenaikan IHK cenderung lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dampak apresiasi terhadap penurunan IHK tersebut.

Selain nilai tukar, guncangan dari sisi penawaran global sering kali bersumber dari harga minyak dunia. Harga komoditas energi ini menjadi salah satu sumber utama dari tekanan *cost-push* di Indonesia. Seperti yang terlihat pada grafik historisnya, harga minyak dunia sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global dan keputusan negara-negara produsen utama. Fluktuasi ini menjadi sangat sensitif bagi perekonomian domestik karena Indonesia telah beralih status dari negara pengekspor (*net exporter*) minyak menjadi net importer minyak dan bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, sebuah fenomena riil yang memperkuat argumen ini adalah tingginya ketergantungan pada pasokan luar negeri, dimana

volume impor BBM secara konsisten jauh lebih besar dibandingkan produksi BBM dari kilang domestik.

Merujuk pada data dan proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Prognosa *Supply Demand* BBM, CNBC (2025), kebutuhan minyak kita mencapai 1,5 juta sampai dengan 1,6 juta barel perhari. Sementara produksi kita hanya sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tingginya angka impor menunjukkan bahwa sekitar 62,5% dari total kebutuhan BBM masih dipenuhi oleh pasar internasional. Ketergantungan impor yang besar inilah yang membuat transmisi kenaikan harga minyak global ke indeks harga konsumen domestik menjadi sangat kuat dan cepat, sebab sebagian besar pasokan energi yang dikonsumsi masyarakat dipengaruhi langsung oleh harga beli dalam Dolar AS. Berikut disajikan data historis harga minyak dunia yang digunakan dalam penelitian ini, menunjukkan tingkat volatilitas yang menjadi sumber utama risiko inflasi.



Sumber: World Bank, 2026 (data diolah)

Gambar 1.7 Harga Minyak Dunia (Crude Oil USD/Barel)

Bagi Indonesia sebagai negara *net importer* minyak dengan ketergantungan impor BBM yang tinggi, kenaikan harga minyak dunia memiliki dampak rambatan yang luas pada indeks harga konsumen. Secara langsung, hal ini memengaruhi harga bahan bakar minyak bersubsidi dan non-subsidi, yang merupakan salah satu penyumbang utama inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (*administered prices*). Secara tidak langsung, kenaikan harga energi ini akan meningkatkan biaya logistik dan transportasi untuk hampir semua barang, serta menaikkan biaya produksi di sektor manufaktur. Studi empiris seperti yang dilakukan oleh Suryanto, et al. (2023), telah mengidentifikasi dampak ini dan menemukan bahwa guncangan harga minyak dunia tidak hanya berdampak signifikan pada komponen IHK energi, tetapi juga merambat secara substansial ke komponen harga pangan (*volatile food*) karena adanya peningkatan biaya produksi dan distribusi pertanian. Oleh karena itu, harga minyak dunia menjadi variabel yang fundamental untuk dimasukkan dalam model analisis faktor yang memengaruhi indeks harga konsumen.

Mayoritas penelitian sebelumnya di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Azis & Hartomo (2023), cenderung berfokus pada analisis determinan dari laju inflasi (*inflation rate*) sebagai target utama dari kerangka kebijakan moneter. Namun, penelitian ini mengajukan sebuah kebaruan dengan menggeser fokus analisis dari laju perubahan harga ke level harga itu sendiri, yang direpresentasikan oleh indeks harga konsumen. Perubahan fokus ini menjadi penting karena adanya kontradiksi yang ditemukan, yaitu meskipun laju inflasi dilaporkan terkendali, kenaikan harga secara kumulatif tidak pernah berhenti sehingga pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat dan memperlebar kesenjangan PDB. *Novelty*

penelitian ini terletak pada fokusnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural dalam jangka panjang, bukan hanya guncangan pada jangka pendek yang mendorong tren kenaikan indeks harga konsumen secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi variabel yang memengaruhi fluktuasi inflasi tahunan, tetapi secara lebih fundamental menginvestigasi akar permasalahan dari kenaikan biaya hidup yang terus-menerus di Indonesia.

Mempertimbangkan kompleksitas hubungan antarvariabel makroekonomi yang telah diuraikan, dimana terdapat indikasi adanya interaksi dinamis dan hubungan jangka panjang, maka diperlukan sebuah metode analisis yang mampu menangkap dinamika tersebut secara komprehensif. Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) sebagai alat analisis utama. Metode ini dipilih karena menawarkan fleksibilitas tinggi dan tetap dianggap andal untuk digunakan pada sampel data yang relatif kecil. Keunggulan ini, sebagaimana divalidasi kembali oleh Shafique dan Abdullah (2020), bersumber dari properti statistik model ARDL yang pertama kali dikemukakan oleh Pesaran et al. (2001), menjelaskan kemampuannya untuk mengidentifikasi kointegrasi serta memodelkan dinamika jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang secara bersamaan menjadikannya alat yang tepat untuk memberikan pemahaman mendalam atas interaksi antarvariabel yang diteliti.

Berdasarkan fenomena dan kebaruan yang telah diidentifikasi, daya tarik utama penelitian ini adalah untuk mengurai secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia. Dengan demikian, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan studi yang berjudul

Analisis Dinamis Faktor Makroekonomi terhadap Indeks Harga Konsumen di Indonesia Periode 2010Q1-2024Q4.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, berikut identifikasi masalah yang peneliti cantumkan:

1. Bagaimana pengaruh jangka pendek dari variabel Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Harga Minyak Dunia terhadap Indeks Harga Konsumen di Indonesia periode 2010-2024?
2. Bagaimana pengaruh jangka panjang dari variabel Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Harga Minyak Dunia terhadap Indeks Harga Konsumen di Indonesia periode 2010-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka terdapat tujuan penelitian yang ingin peneliti capai, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh jangka pendek Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Harga Minyak Dunia terhadap Indeks Harga Konsumen di Indonesia periode 2010-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh jangka panjang Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Harga Minyak Dunia terhadap Indeks Harga Konsumen di Indonesia periode 2010-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian adalah kontribusi yang dihasilkan dari sebuah penelitian, baik kegunaan/manfaat teoretis maupun kegunaan/manfaat praktis hasil

penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya maupun para pembaca yang tertarik pada topik ekonomi makro Indonesia. Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan penelitian ini selain menggeser fokusnya pada level harga, tetapi juga melalui penerapan model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) untuk menganalisis pengaruh dari variabel moneter (JUB, BI Rate), variabel sektor riil (PDB Riil), dan faktor eksternal (Nilai Tukar, Harga Minyak Dunia) terhadap Indeks Harga Konsumen dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Penggunaan model ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya hubungan keseimbangan jangka panjang (*kointegrasi*) sekaligus menganalisis mekanisme penyesuaian jangka pendek. Melalui pendekatan ini, dapat diestimasi secara bersamaan seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut dalam membentuk tren jangka panjang inflasi serta bagaimana dinamika jangka pendeknya merespons berbagai guncangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru dan memperkuat landasan teoretis yang sudah ada, dengan menyajikan bukti empiris mengenai bagaimana variabel-variabel ekonomi merespons guncangan untuk kembali menuju keseimbangan jangka panjangnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris untuk merumuskan kebijakan moneter yang lebih terukur. Pemahaman mengenai respons inflasi (IHK) dan pertumbuhan ekonomi (PDB Riil) terhadap perubahan suku bunga acuan serta guncangan dari faktor eksternal dapat membantu otoritas dalam menentukan langkah kebijakan yang lebih tepat waktu dan efektif untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

1.4.2.2 Bagi Pelaku Bisnis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis dan investor dalam mengantisipasi arah perubahan kondisi ekonomi dan menyesuaikan strategi perusahaan mereka.

1.4.2.3 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, khususnya mengenai interaksi antar variabel moneter, riil, dan eksternal di Indonesia melalui pendekatan model ARDL. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian lanjutan terkait dinamika stabilitas makroekonomi di Indonesia.

1.4.2.4 Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat inflasi (IHK) dan pertumbuhan ekonomi (PDB Riil), seperti perubahan suku bunga acuan (*BI Rate*), nilai tukar, serta harga minyak dunia di Indonesia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah, penulis terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi di satu negara yaitu Indonesia, melalui pengambilan data sekunder dari situs resmi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), *World Bank* dan sumber relevan lainnya yang menyajikan data valid mengenai perekonomian di Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak keluarnya Surat Keputusan pada bulan September 2025, yang diawali dengan pengajuan judul. Adapun pelaksanaan penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara interaktif oleh penulis dan selanjutnya bimbingan dengan dosen pembimbing, pengumpulan data, kemudian pengajuan seminar usulan penelitian kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan. Berikut jadwal penelitian ini:

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	2025												2026										
		Sep			Okt				Nov				Des				Jan				Feb			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■																				
2.	Penulisan BAB I, II, dan III				■	■	■	■	■															
3.	Bimbingan & Revisi								■	■	■	■	■											
4.	Seminar Usulan Penelitian													■										
5.	Revisi Usulan Penelitian														■	■								

